

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Optimalisasi Open Data Pemilu untuk Memperkuat Integritas Pemilu 2024

Pemateri :

1. **Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII**
2. **Nur Wakti Aliyusron, Kepala Pusat Data dan Informasi KPU RI**
3. **Imron Zuhri, Chief Technology Officer (CTO) Databot**

Moderator : Nuri Resti Chayyani, Peneliti Bidang Ekonomi

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII

- Pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilu paling besar dan rumit yang diselenggarakan di Indonesia. Pasalnya, di tahun 2024 nanti akan diselenggarakan pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun yang sama.
- Salah satu upaya dalam memperkuat integritas Pemilu dan Pilkada 2024, yaitu perlunya mendorong optimalisasi keterbukaan data pemilu (*open election data*).
- Terdapat sembilan prinsip open data, yaitu tepat waktu, granular, tersedia gratis di internet, lengkap dalam satu bulk, dapat dianalisis, non-properiatery, tidak diskriminatif, bebas lisensi dan tersedia secara permanen
- Situs <https://opendata.kpu.go.id/>, telah diluncurkan oleh KPU sejak 29 September 2021 yang lalu. Portal open data KPU menyediakan data kepemiluan dalam bentuk API (application programming interface) serta format lain, seperti json, csv, doc, xls, dan pdf.
- Berdasarkan pantauan situs open data KPU hingga 14 Oktober 2022, terdapat 155 dataset yang terdiri 342 file data dari 10 topik
- Pemantauan TII juga menemukan bahwa masih ada beberapa kategori data yang masih belum tersedia di portal open data KPU. Beberapa diantaranya adalah terkait kerangka hukum, berita acara penyelenggara pemilu, kampanye, laporan dana kampanye, data pengamanan pemilu, kualifikasi surat suara, data pendaftaran partai politik, dan data tempat pemungutan suara.

- Khusus mengenai data terkait dengan keamanan pemilu tidak terdapat sama sekali di berbagai portal yang disediakan oleh KPU
- Pada SIPOL, tidak disediakan informasi terkait visi, misi, dan program partai tersebut. KPU hanya membuat kolom anggaran dasar dan rumah tangga yang berisi nomor anggaran dan tanggal anggaran
- KPU juga perlu untuk mempertimbangkan pendekatan lain bagi penyandang disabilitas yang ingin mengakses informasi dari laman ini.
- Secara umum catatan pengamatan dari laporan tahunan TII menunjukkan bahwa penerapan Sipol telah mengalami perbaikan
- Masih terdapat berbagai tantangan terkait implementasi PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang SPBE. SPBE sendiri merupakan bagian dari implementasi satu data dalam rangka pendukung terwujudnya keterbukaan data di tubuh KPU.
- Penelitian TII menemukan bahwa minimnya sosialisasi tentang pentingnya data pemilu terbuka dan SPBE masih menjadi persoalan di internal KPU
- Tantangan pelaksanaan open data KPU yaitu, keterbatasan tenaga pengelola data pada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU.
- Peningkatan kapasitas internal KPU baik di pusat maupun daerah menjadi penting, mengingat KPU sebagai badan penyelenggara merupakan pelaksana kebijakan data pemilu terbuka.
- Persoalan minimnya infrastruktur masih ditemukan baik dalam bentuk penyediaan perangkat komputer hingga jaringan internet yang kurang merata.

Nur Wakti Aliyusron, Kepala Pusat Data dan Informasi KPU RI

- Digitalisasi pemilu merupakan Proses perubahan berkas hasil Pemilu menjadi data digital dengan menerapkan prinsip data terbuka dalam rilis data.
- Data tersedia dalam format terbuka yang mudah dibagi, dipakai, dan dibaca oleh sistem elektronik
- Prinsip pengembangan digitalisasi Pemilu adalah Meningkatkan derajat Pemilu demokratis, Semua tahapan Pemilu kecuali tungsura, Memudahkan para pihak (Pemilih dan peserta), Jaminan keamanan digital, dan Data Pemilu terbuka
- Tujuan Satu Data KPU : Arsip Lembaga; Menyediakan data siap olah kepada publik; Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas KPU
- Masyarakat, Pengawas, dan Peserta Pemilu bisa mengakses secara luas data verifikasi Partai Politik
- Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap keanggotaan Partai Politik

- mengenai jajaran penyelenggara Pemilu di jajaran KPU secara berkelanjutan, saat ini sudah 180,416 pendaftar Badan Adhoc (PPK dan PPS)
- Saat ini sudah sekitar 2.886.845 pemilih yang mengakses cekdptonline.kpu.go.id

Imron Zuhri, Chief Technology Officer (CTO) Databot

- KPU perlu untuk menjelaskan data yang tersedia ataupun data yang tidak tersedia
- KPU perlu untuk dapat menjelaskan mengenai asal-usul data, seperti kapan data tersebut dibuat dan darimana data tersebut.
- Persepsi terhadap transparansi merupakan hal penting
- Saat ini, KPU telah berkembang dengan baik terkait keterbukaan data pemilu
- KPU perlu untuk mengoptimalkan sosialisasi, walaupun tugas tersebut bukan hanya KPU melainkan tugas berbagai pihak.
- Menuju pemilu 2024, perlu untuk menghadirkan data yang dapat membantu pemilih dalam memilih
- Data harus dapat diterjemahkan dengan baik sehingga pemilih mudah untuk mencerna

FORUM DISKUSI

Pertanyaan Ahmad Hidayah

1. Terkait prinsip dalam open data, dijelaskan bahwa data harus dapat dibaca oleh mesin. Bukankah seharusnya dapat dibaca oleh pemilih lebih penting. Bagaimana terkait hal tersebut?
2. Pada pemilu tahun 2019, salah satu hoax yang terjadi adalah adanya isu pencoblosan surat suara sebelum masa pemilihan. Bagaimana upaya KPU saat ini dalam mengembangkan SILOG sehingga hal tersebut bisa tidak terjadi di pemilu 2024 mendatang?

Jawaban

1. Sebenarnya, untuk saat ini yang lebih penting adalah data yang ramah bagi untuk pengguna. Oleh itu, data perlu dibagi menjadi beberapa format, untuk yang memang mengerti penggunaannya seperti JSON, ataupun yang mudah digunakan dan dibaca oleh masyarakat umum.
2. Saat ini KPU sedang mengembangkan SILOG agar dapat diakses secara tepat waktu guna mengantisipasi persoalan hoax seperti yang terjadi di pemilu 2019.

Closing Statement

1. Nur Wakti Aliyusron, Kepala Pusat Data dan Informasi KPU RI

KPU bersifat terbuka untuk kritik dan saran dari siapa saja guna menciptakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

2. Imron Zuhri, Chief Technology Officer (CTO) Databot

Kita harus dapat membantu KPU untuk dapat memperhatikan persepsi publik terkait data yang dibutuhkan oleh publik

3. Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII

Permasalahan yang terjadi di pemilu 2019 mungkin dapat terulang kembali di pemilu 2024 mendatang. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami permasalahan secara tepat sehingga dapat memberikan solusi secara tepat.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

~ TERIMA KASIH ~